PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun Anggaran 202**5** ini dapat diselesaikan. Dokumen Renja ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Biro Organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa Sekretariat Daerah memegang peran krusial dalam perumusan kebijakan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan efektivitas kinerja instansi. Oleh karena itu, Renja ini dirancang untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang kami laksanakan selaras dengan visi dan misi organisasi, serta berkontribusi nyata pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam proses penyusunan Renja ini, mulai dari tim internal Biro Organisasi, unit kerja terkait, hingga para pihak yang memberikan masukan dan saran konstruktif. Dukungan dan kerja sama yang baik menjadi kunci keberhasilan kami dalam merumuskan rencana yang komprehensif, terukur, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dokumen Renja ini masih memiliki keterbatasan. Untuk itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan Sumsel Maju Terus untuk Semua dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman utama bagi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Penyusunan Renja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus perencanaan pembangunan yang lebih luas, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah khusunya Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan. Proses ini vital untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Kebutuhan akan Renja yang terstruktur dan terukur semakin mendesak mengingat dinamika lingkungan strategis yang terus berubah. Faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan nasional, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, menuntut adanya respons yang cepat, adaptif, dan terarah. Tanpa Renja yang jelas, potensi disorientasi dan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya akan sangat besar. Oleh karena itu, Renja 2025 dirancang untuk menjadi instrumen navigasi yang memandu seluruh unit kerja menuju pencapaian target-target yang realistis dan berdampak.

Penyusunan Renja 2025 juga berlandaskan pada evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini menjadi bahan refleksi untuk mengidentifikasi keberhasilan yang perlu dipertahankan dan area-area yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan evaluasi tersebut, Renja 2025 memuat berbagai inovasi dan perbaikan program untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sebelumnya, sekaligus mengoptimalkan potensi yang ada. Dengan demikian, Renja ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah komitmen kolektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Singkatnya, Renja Tahun 2025 ini adalah wujud konkret dari perencanaan yang matang dan berorientasi hasil. Dokumen ini menjadi jembatan antara ide

dan eksekusi, memastikan setiap sumber daya—baik finansial, manusia, maupun teknis—dialokasikan secara optimal untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Organisai Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undag-undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, sebagai acuan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan utama dalam penyelarasan tujuan dan sasaran Renstra Biro Hukum dan HAM.
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang menetapkan fungsi strategis Biro Hukum dan HAM dalam mendukung pelaksanaan tugas gubernur sebagai kepala daerah.

Selain itu, penyusunan Renja 2025 juga mengacu pada peraturan teknis yang lebih spesifik, seperti **Surat Edaran Kepala Daerah** dan **Peraturan Kepala Daerah** yang mengatur petunjuk teknis penyusunan Renja. Peraturan-peraturan ini memastikan bahwa Renja disusun sesuai dengan dinamika dan prioritas pembangunan yang berlaku di daerah. Dengan demikian, dokumen Renja 2025 ini disusun secara sistematis, terukur, dan memiliki **kekuatan hukum** yang kuat sebagai landasan pelaksanaan program pembangunan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan langkah strategis yang didesain untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dijalankan selaras dengan tujuan strategis daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan yang akan mengarahkan seluruh unit kerja di bawah Biro Organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Secara fundamental, Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Menerjemahkan Visi, Misi, dan Tujuan Strategis. Renja ini menjadi alat untuk mengonversi target jangka panjang dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi program dan kegiatan yang lebih konkret, terukur, dan dapat dieksekusi dalam kurun waktu satu tahun.

2. Sebagai Panduan Kerja. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi seluruh jajaran di Setda Provinsi Sumatera Selatan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kinerja. Dengan panduan yang jelas, potensi tumpang tindih atau disorientasi program dapat diminimalisasi.
3. Landasan Alokasi Anggaran. Renja ini menjadi dasar dalam pengajuan dan alokasi anggaran tahunan, memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dialokasikan untuk program yang memiliki prioritas tinggi dan memberikan dampak maksimal.

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Organisasi. Renja ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melaksanakan program-program yang dapat memperkuat struktur, tata kelola, dan sistem kerja internal pemerintahan. Ini termasuk perbaikan pada sistem kepegawaian, pengembangan budaya kerja, serta peningkatan layanan administrasi.

2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima. Dengan perbaikan tata kelola dan birokrasi, Renja ini secara tidak langsung bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

3. Sinkronisasi Program. Renja ini bertujuan untuk menyinkronkan program Biro Organisasi dengan rencana kerja unit-unit kerja lain di lingkungan pemerintah daerah. Sinkronisasi ini penting untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi, menghindari duplikasi, serta memastikan semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama.

4. Menjadi Instrumen Pengendalian dan Evaluasi. Dokumen ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas, Biro Organisasi dapat mengukur pencapaian, mengidentifikasi kendala, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan secara cepat.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Bekalang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisa Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

RKPD Bab III Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program

dan Kegiatan

3.1 Visi dan Misi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.4 Program dan

Kegiatan Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk mengindetikasi kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah selama tahun 2024 dan perkiraan target pada tahun 2025.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berikut gambaran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan pada masing-masing Biro di lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan.

- **Administrasi Pembangunan**

  Evaluasi disini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja masing-masing program yang telah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. Kegiatan Tahun 2024 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dengan anggaran sebesar Rp.1.766.924.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh

Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sampai dengan Desember 2024 yaitu sebesar Rp.1.399.480.093,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Secara detail pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program penunjang urusan pemerintah daerah ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Biro Adminstrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dengan indikator terwujudnya tugas-tugas pelayanan administrasi perkantoran dengan target program sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan yang bersifat rutin. Alokasi untuk melaksanakan program ini sebesar Rp.1.016.924.000,- (Satu Milyar Enam Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Penjelasan secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator tersedianya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar

Rp. 17.559.300,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan capaian 70,24 %.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator tersdianya dokumen hasil pelaksanaan tugas ASN. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp.111.160.000,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.111.160.000,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian 100%.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya dengan indikator tersedianya pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp.52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.900.000,- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan capaian sebesar 98,86%.
- Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator Terlaksananya pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.286.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan capaian sebesar97,62%.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan indikator terlaksananya jumlah orang yang mengikuti bimbingan dan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Sub kegiatan tersebut tidak terealisasi dikarenak tidak adanya undangan.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran. Pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.63.235.900,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan capaian sebesar 63,24%.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator tersedianya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Pagu anggaran sebesar Rp.329.600.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.272.170.726,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan capaian sebesar 82,58%.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator tersedianya sarana dan

prasarana perkantoran yang tersedia. Pagu anggaran sebesar Rp.85.900.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.85.520.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian sebesar 99,56%.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Terlaksananya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran. Pagu anggaran sebesar Rp. 276.764.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 192.573.000,-(Seratus Sembilan Puluh Dua juta Lima ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan capain sebesar 69,58%.

2. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program Kebijakan Administrasi Pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Biro Adminstrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dengan indikator Persentase penyerapan realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan rencana dan target. Adapun target program sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Alokasi untuk melaksanakan program ini sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Penjelasan secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan

- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dengan indikator tersedianya jumlah laporan hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan dana APBD Provinsi. Pagu anggaran Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan realisai keuangan sebesar Rp. 139.494.595,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan capaian sebesar 69,75%.
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN dengan indikator tersedianya jumlah laporan hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan dana APBN Provinsi. Pagu anggaran Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.888.601,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Satu Rupiah) dengan capaian sebesar 81,72%.
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dengan indikator tersedianya jumlah laporan hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan wilayah. Pagu anggaran Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 100.683.737,- (Seratus Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan capain sebesar 91,53%.

2) Kegiatan Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan

- Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dengan indikator tersedianya jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Pagu anggaran Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.167.570,- (Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) capaian sebesar 53,79%.
- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan indikator tersedianya jumlah laporan hasil pelaksanaan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Pagu anggaran Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 83.661.780,- (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan capaian sebesar 76,06%.
- Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah dengan indikator tersedianya jumlah dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah. Pagu anggaran Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan capaian sebesar 93,80%.

Adapun secara rinci untuk penyerapan realisasi fisik dan keuangan progam dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada gambar dibawah berikut ini:

Gambar 1. Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Adm. Pembangunan TA 2024

Pengadaan Barang dan Jasa

Pada Tahun Anggaran 2024 Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.794.400.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

2.1.1.1. <u>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>

2.1.1.1.1 *Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*

2.1.1.2. <u>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>

2.1.1.2.1 *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

2.1.1.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.1.1.3.1 *Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

2.1.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.1.1.4.1 *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

2.1.2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

2.1.2.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.2.1.1 *Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.1.2 *Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.1.3 *Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.2. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

2.1.2.2.1 *Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik*

2.1.2.2.2 *Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.2.3 *Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.3. Kegiatan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.2.3.1 *Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia PBJ*

2.1.2.3.2 *Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.3.3 *Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran anggaran sebesar Rp 1.529.400.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) kegiatan, 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

2.1.1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub

kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran anggaran sebesar Rp. 250.400.000,- (dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

  Untuk pembayaran Honorarium KPA dan PPTK sesuai Standar Biaya Umum.

  Realisasi Keuangan : Rp.188.560.000 (75,30%)
  Realisasi Fisik : 100 %

2.1.1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran anggaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

  Untuk Biaya perjalanan dinas rutin kantor dalam daerah dan luar daerah selama Tahun 2024
  Realisasi Keuangan : Rp.68.397.713 (91,20%)
  Realisasi Fisik : 100%

2.1.1.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran anggaran sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);

  Untuk Pembelian sarana dan prasarana untuk kantor pada Biro PBJ;
  Realisasi Keuangan : Rp.119.550.000 (28,46%)
  Realisasi Fisik : 100%

2.1.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran anggaran sebesar Rp. 784.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah), terdiri dari :
  a. Belanja Tenaga Kerja Honorer 15 (lima belas) orang dan 4 (empat) orang TKPD
  b. Belanja Jasa Kebersihan Kantor
  c. Belanja Alat Kebersihan Kantor

  Realisasi Keuangan : Rp.506.106.500 (65,65%)
  Realisasi Fisik : 100%

2.1.2. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu :

2.1.2.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
  a. Melakukan analisa pasar .
  b. penyusunan kebijakan strategi pengadaan barang dan jasa.
  c. Pelaksanaan konsolidasi pengadaan

  Realisasi Keuangan : Rp.157.731.670 (85,26%)

  Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
  Realisasi Keuangan : Rp.164.512.157 (99,70%)
  Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

  a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi UKPBJ Tingkat Provinsi Tahun 2024;

  b. Pelaksanaan Katalog Lokal;

  c. Pelaksanaan Tender PBJ;

  Realisasi Keuangan : Rp.761.562.243 (97,64%)
  Realisasi Fisik : 100%

2.1.2.2. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
  Untuk pembayaran sewa Internet, *Mail Server*, sewa Rak *Colocation* selama 1 (satu) tahun.
  Realisasi Keuangan : Rp.638.441.978 (88,67%)
  Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  Untuk pembayaran pemeliharaan *software* selama 1 (satu) tahun dan Monev LPSE;
  Realisasi Keuangan : Rp.190.109.976 (97,49%)
  Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
  Pengelolaan Informasi terkait pengadaan Barang dan Jasa berupa dokumentasi dan penyampaian informasi terkait pengadaan barang dan jasa berupa video, spanduk dan baleho.
  Realisasi Keuangan : Rp.198.837.534,- (94,68%)
  Realisasi Fisik : 100%

2.1.2.3. Kegiatan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia PBJ dengan anggaran sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

  Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia PBJ, Peningkatan Kompetensi SDM PBJ, Workshop, Ujian Sertifikasi PBJ serta biaya kontribusi Bimtek Personil Pengelola PBJ Tahun 2024.

  Realisasi Keuangan : Rp.676.593.107 (93,97%)

  Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

  Penyusunan Tingkat Kematangan UKPBJ, Rakor Jabfung UKBPJ Kab/Kota.

  Realisasi Keuangan : Rp.261.410.731,- (95,06%)

  Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah);

  Pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan pendampingan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan UKPBJ Kab/Kota dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Pelaksanaan Bimtek Personil UKPBJ pada OPD dan Kabupaten/Kota.

  Realisasi Keuangan : Rp.1.000.039.069,- (98,53%)

  Realisasi Fisik : 100%

3. Realisasi Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.794.400.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Realisasi Keuangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.4.873.252.678,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah atau 84,10 % dari total anggaran.

Realisasi Fisik per 31 Desember 2024 sebesar 100 %.

Organisasi

Berdasarkan laporan akhir tahun, tingkat realisasi fisik program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 100%, sementara tingkat realisasi keuangan berada di angka 93,61%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang solid dalam mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan, Rincian Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2024 Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi			SILPA	
			Keuangan		Fisik	(Rp.)	(%)
			(Rp.)	%	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A.	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	**1,668,609,790**	**1,627,153,070**	**97.52%**	**100%**	**41,456,720**	**2.48%**
I.	***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**12,000,000**	**8,790,000**	**73.25%**	**100%**	**3,210,000**	**26.75%**
1	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,000,000	8,790,000	73.25%	100%	3,210,000	**26.75%**
II.	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**160,400,000**	**148,290,000**	**92.45%**	**100%**	**12,110,000**	**7.55%**
2	Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160,400,000	148,290,000	92.45%	100%	12,110,000	**7.55%**
III.	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**227,000,000**	**217,535,459**	**95.83%**	**100%**	**9,464,541**	**4.17%**
3	Sub-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnya	21,000,000	20,847,000	99.27%	100%	153,000	**0.73%**
4	Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,000,000	98,057,459	98.06%	100%	1,942,541	**1.94%**
5	Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	85,000,000	81,931,000	96.39%	100%	3,069,000	**3.61%**
6	Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21,000,000	16,700,000	79.52%	100%	4,300,000	**20.48%**
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431,660,000	431,384,000	99.94%	100%	276,000	**0.06%**
10	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	431,660,000	431,384,000	99.94%	100%	276,000	**0.06%**
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,000,000	63,177,000	97.20%	100%	1,823,000	**2.80%**
11	Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	40,000,000	40,000,000	100.00%	100%	-	**0.00%**
12	Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,000,000	23,177,000	92.71%	100%	1,823,000	**7.29%**
B.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1,081,860,000	947,527,058	91.26%	100%	134,332,942	**12.42%**
VIII.	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	330,000,000	300,665,357	91.24%	100%	29,334,643	**8.89%**
13	Sub-Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	80,000,000	78,565,094	98.21%	100%	1,434,906	**1.79%**
14	Sub-Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	80,000,000	67,781,466	84.73%	100%	12,218,534	**15.27%**

15	Sub-Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	170,000,000	154,318,797	90.78%	100%	15,681,203	**9.22%**
IX.	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	751,860,000	646,861,701	91.28%	100%	104,998,299	**13.97%**
16	Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	110,000,000	101,669,313	92.43%	100%	8,330,687	**7.57%**
17	Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	321,860,000	236,178,141	73.38%	100%	85,681,859	**26.62%**
18	Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	100,000,000	98,932,580	98.93%	100%	1,067,420	**1.07%**
19	Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	120,000,000	110,639,876	92.20%	100%	9,360,124	**7.80%**
20	Sub-Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	100,000,000	99,441,791	99.44%	100%	558,209	**0.56%**
	Total	2,750,469,790	2,574,680,128	93.61%	100%	175,789,662	**6.39%**

Umum dan Perlengkapan

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut ini turunan Renja OPD Tahun 2023 yang terealisasi dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Penyelesaian Pekerjaan : 81,62%
   Anggaran : Rp. 350.000.000
   Realisasi : Rp. 285.665.215
   Sisa : Rp. 64.334.785

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Penyelesaian Pekerjaan : 94,04%
   Anggaran : Rp. 63.997.418.000
   Realisasi : Rp. 60.185.526.342
   Sisa : Rp. 3.811.891.658

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	89,38%
Anggaran	:	Rp. 1.730.000.000
Realisasi	:	Rp. 1.546.214.003
Sisa	:	Rp. 183.785.997

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	15,01%
Anggaran	:	Rp. 185.900.000
Realisasi	:	Rp. 27.910.000
Sisa	:	Rp. 157.990.000

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	90,22%
Anggaran	:	Rp. 41.807.750.000
Realisasi	:	Rp. 37.720.555.790
Sisa	:	Rp. 4.087.194.210

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	98,26%
Anggaran	:	Rp. 27.300.000.000
Realisasi	:	Rp. 26.824.243.850
Sisa	:	Rp. 475.756.150

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	96,04%
Anggaran	:	Rp. 57.152.400.000
Realisasi	:	Rp. 54.888.472.648
Sisa	:	Rp. 2.263.927.352

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	81,05%
Anggaran	:	Rp. 49.184.613.000
Realisasi	:	Rp. 39.864.268.608
Sisa	:	Rp. 9.320.344.392

9. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	93,55%
Anggaran	:	Rp. 10.865.084.000
Realisasi	:	Rp. 10.164.510.598
Sisa	:	Rp. 700.573.402

10. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	75,19%
Anggaran	:	Rp. 11.687.600.000
Realisasi	:	Rp. 8.787.605.755
Sisa	:	Rp. 2.899.994.245

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dirincikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi
Program Kegiatan yang tercantum pada RKPD
Biro Umum dan Perlengkapan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P. APBD	Realisasi	%	Sisa
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**350.000.000**	**285.665.215**	**81,62**	**64.334.785**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000	69.902.004	77,67	20.097.996
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.000.000	34.992.275	99,98	7.725
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.000.000	34.975.000	99,93	25.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.000.000	34.920.600	99,77	79.400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	35.000.000	34.896.500	99,70	103.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	59.846.005	99,74	153.995
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	16.132.831	26,89	43.867.169
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**63.997.418.000**	**60.185.526.342**	**94,04**	**3.811.891.658**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P. APBD	Realisasi	%	Sisa
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62.897.418.000	59.291.075.162	94,27	3.606.342.838
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.100.000.000	894.451.180	81,31	205.548.820
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**1.730.000.000**	**1.546.214.003**	**89,38**	**183.785.997**
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.500.000.000	1.389.392.924	92,63	110.607.076
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	130.000.000	111.335.379	85,64	18.664.621
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	45.485.700	45,49	54.514.300
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**185.900.000**	**27.910.000**	**15,01**	**157.990.000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	-	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.900.000	13.250.000	15,42	72.650.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	14.660.000	14,66	85.340.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**41.807.750.000**	**37.720.555.790**	**90,22**	**4.087.194.210**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	800.000.000	542.416.530	67,80	257.583.470
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.150.000.000	3.521.238.560	68,37	1.628.761.440
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500.000.000	405.151.200	81,03	94.848.800
Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.157.750.000	27.677.806.411	94,92	1.479.943.589
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000.000	5.374.452.969	89,57	625.547.031
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200.000.000	199.490.120	99,75	509.880
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**27.300.000.000**	**26.824.243.850**	**98,26**	**475.756.150**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.904.000.000	9.533.300.000	96,26	370.700.000
Pengadaan Mebel	2.300.000.000	2.295.921.000	99,82	4.079.000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	400.000.000	398.346.250	99,59	1.653.750
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.696.000.000	14.596.676.600	99,32	99.323.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**57.152.400.000**	**54.888.472.648**	**96,04**	**2.263.927.352**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140.000.000	139.979.900	99,99	20.100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.090.000.000	7.557.913.403	83,15	1.532.086.597
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000.000	32.613.658.100	98,83	386.341.900
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.922.400.000	14.576.921.245	97,68	345.478.755

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P. APBD	Realisasi	%	Sisa
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**49.184.613.000**	**39.864.268.608**	**81,05**	**9.320.344.392**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	1.300.000.000	733.260.250	56,40	566.739.750
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	11.784.613.000	10.940.665.867	92,84	843.947.133
Pemeliharaan Mebel	800.000.000	675.491.900	84,44	124.508.100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.350.000.000	25.984.039.963	77,91	7.365.960.037
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	1.950.000.000	1.530.810.628	78,50	419.189.372
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**10.865.084.000**	**10.164.510.598**	**93,55**	**700.573.402**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	262.979.000	190.340.598	72,38	72.638.402
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.650.685.000	2.612.170.000	98,55	38.515.000
Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	7.940.395.000	7.362.000.000	92,72	578.395.000
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	11.025.000	0	-	11.025.000
Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	**11.687.600.000**	**8.787.605.755**	**75,19**	**2.899.994.245**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8.485.000.000	7.301.218.505	86,05	1.183.781.495
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.925.000.000	901.101.300	46,81	1.023.898.700
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	1.277.600.000	585.285.950	45,81	692.314.050
Jumlah	**264.260.765.000**	**240.294.972.809**	**90,93**	**23.965.792.191**

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada kegiatan/sub kegiatan di atas sangat baik khususnya pada kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu mencapai 98,26%, sedangkan titik serapan yang terendah ada pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu hanya sebesar 15,01%. Beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah disebabkan karena :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Biro Umum dan Perlengkapan dengan OPD lain
3. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
4. Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan/sub kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di atas, maka perlu diambil beberapa kebijakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
3. Kerjasama dengan pihak OPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Realisasi dan Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026

Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan pencapaian sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	71,93	72,69	68,19	-	68,44	-

Indikator Kinerja Kunci Utama (IKU) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. IKU ini harus spesifik, dapat diukur (measurable), relevan, dan dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta selaras dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra.

Tabel 1.2.
Indikator Kinerja Kunci Utama (IKU)
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)		Sumber Data
					Indikator	Perhitungan	
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	- SIRUP	Nilai RUP SIRUP dibandingkan dengan nilai belanja PBJ	Basis Data RUP
					- ePurchasing	Jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk ePurchasing (Katalog Elektronik)	Basis Data Katalog Elektronik
					-non Etendering/non ePurchasing	Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung	Basis data SPSE (transaksional & pencatatan) dan RUP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)		Sumber Data
					Indikator	Perhitungan	
					- eTendering	Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk eTendering	Basis data Realisasi dan RUP
					Toko Daring	Sudah pernah melakukan ePurchasing melalui Toko Daring	Basis data Toko Daring
					- eKontrak	Jumlah paket dicatatkan dalam e-Kontrak dibandingkan jumlah paket transaksional	Basis data SPSE
					- Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Jumlah SDM yang telah dipenuhi	https://ppsdm.lkpp.go.id/jumlah-dan-persebaran-jabfung-ppbj/pemda untuk Pemerintah Daerah
					- Tingkat Kematangan UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ yang telah dipenuhi	Monitoring Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ bisa dilihat melalui https://siukpbj.lkpp.go.id/peta-kematangan

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

IKK Outcome : Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditanda tangani pada kuartal pertama
Penjelasan IKK :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pengadaan	Jumlah Kontrak infrastruktur dengan nilai yang besar yang diperlukan pembangunan dalam kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n / Jumlah kontrak keseluruhan tahun n x 100 %	0 / 220 x 100 % = 0 %	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov.Sumsel

IKK Outcome : Persentase Jumah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif
Penjelasan IKK :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pengadaan	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah seluruh pengadaan x 100 %	2627 / 4782 x 100 % = 54,93 %	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov.Sumsel

IKK Outcome : Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Penjelasan IKK :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pengadaan	Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan / Total belanja operasional dan modal x 100 % Keterangan :	1.050.187.965.695 / 4.075.110.568.745,68 x 100 % = 25,77%	Biro Barang/Jasa Setda Prov.Sumsel

		- Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 ttg pengelolaan keuangan daerah, bahwa belanja langsung tidak dikenal lagi, sehingga dirubah menjadi belanja operasional dan belanja modal. Rumus yang digunakan adalah jumlah nilai belanja operasional dan belanja modal yang melalui pengadaan dibagi total belanja operasional dan modal di APBD provinsi - Belanja operasional adalah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan social - Angka yang diambil adalah angka realisasi		

IKK Outcome : Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Penjelasan IKK :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pengadaan	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (n) – Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (n-1) Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, **x 100 %**	= 1.688.868.713.436 - 1.768.298.584.812 / 1.768.298.584.812 x 100 % **= - 4,49 %**	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov.Sumsel

- **Organisasi**

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 menunjukkan arah positif menuju birokrasi yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan yang telah dicapai menjadi modal penting, sementara tantangan yang dihadapi akan menjadi fokus perbaikan untuk tahun 2025. Pergeseran anggaran dan program kerja akan difokuskan untuk mengatasi kendala tersebut, memastikan Biro Organisasi tetap menjadi pilar utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

- **Umum dan Perlengkapan**

Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2025 - 2029 maka Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan mewujudkan misi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Umum dan Perlengkapan guna terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (Good Governance). Seiring dengan perkembangan waktu, Biro Umum dan Perlengkapan mulai memperbaiki kinerja pelayanan dengan membenahi program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, sehingga mekanisme kerja lebih sistematis, terstruktur dan terarah.

Biro Umum dan Perlengkapan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memiliki kontribusi terhadap penyelenggaraan tugas

pemerintah dan kemasyarakatan dalam bentuk pemberian pelayanan umum dan pimpinan. Dimana dalam melaksanakan tupoksinya, Biro Umum dan Perlengkapan sudah memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efisien serta berkualitas terhadap pimpinan, instansi pemerintah, aparatur pemerintah, tamu-tamu dan masyarakat secara luas.

Adapun bentuk pelayanan yang diberikan oleh Biro Umum dan Perlengkapan dari tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap Pimpinan (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah) :
   a. Penyediaan makanan dan minuman untuk untuk harian pimpinan;
   b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan peralatan rumah jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah;
   c. Penyediaan jasa kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (medical check-up di Rumah Sakit Dr. Moehammad Hoesin)
2. Pelayanan terhadap tamu-tamu
   a. Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu-tamu Pemda (misalnya : Presiden/Wapres, Menteri);
   b. Penyediaan kendaraan untuk tamu-tamu VIP;
   c. Penyediaan fasilitas penerimaan kedatangan/keberangkatan tamu-tamu di VIP Bandara SMB II untuk Presiden/Wakil Presiden dan pejabat setingkat kementerian.
3. Pelayanan terhadap instansi lain
   a. Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat;
   b. Penyediaan kendaraan untuk tamu-tamu instansi (jika diperlukan);
   c. Penyediaan dan pemeliharaan terhadap sarana/prasarana studio dan komunikasi di lingkungan Sekretariat Daerah;
   d. Penyediaan fasilitas di ruang rapat/pertemuan Bina Praja, Auditorium Bina Praja, Ruang saji ataupun pertemuan di Pendopo Griya Agung;
   e. Penyediaan Sarana dan Prasana di lingkungan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan pada periode 2025-2029

kinerja Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan dan penataan dibidang sarana dan prasarana kerja dan aset seperti pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan, inventarisasi dan penghapusan alat perlengkapan kantor, sarana dan prasarana kantor lainnya dan sejumlah aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
2. Pelayanan, penatausahaan administrasi dan pengelolaan di bidang keuangan, anggaran dan pembangunan di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
4. Pelayanan aparatur di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta pelayanan dan fasilitasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sepanjang tahun 2024, Biro Organisasi menghadapi sejumlah isu penting yang sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Isu-isu ini tidak hanya bersifat internal, tetapi juga berkaitan dengan dinamika eksternal, seperti tuntutan masyarakat dan perubahan regulasi. Analisis terhadap isu-isu ini menjadi kunci untuk merumuskan strategi dan program kerja yang lebih responsif di masa depan.

Isu Utama dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1. Transformasi Digital Birokrasi. Isu paling mendesak adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan dan mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

2.3.2. Dinamika Regulasi dan Kelembagaan. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, menuntut Biro Organisasi untuk bergerak cepat dalam melakukan penyesuaian regulasi di tingkat daerah. Proses analisis dan evaluasi kelembagaan yang berkelanjutan menjadi vital untuk memastikan struktur organisasi tetap ramping

dan efektif, tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik.

2.3.3. Penguatan Budaya Kerja Berorientasi Kinerja. Birokrasi sering kali dihadapkan pada tantangan untuk bergeser dari budaya kerja yang berfokus pada prosedur menjadi budaya yang berorientasi pada hasil (kinerja). Isu ini meliputi penataan sistem manajemen kinerja yang lebih terukur, objektif, dan transparan, serta sosialisasi yang pasif untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas kerja.

2.3.4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). meskipun program pelatihan telah dilaksanakan, masih terdapat keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi spesifik di bidang analisis kebijakan, tata kelola digital, dan reformasi birokrasi. Isu ini diperparah dengan tingginya beban kerja, sehingga optimalisasi SDM yang ada menjadi sangat krusial.

2.3.5. Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektor. Sebagai lembaga yang mengurusi tata kelola, Biro Organisasi menghadapi isu koordinasi dengan perangkat daerah lain. Seringkali, terjadi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya sinergi dalam program kerja yang seharusnya terintegrasi, seperti penataan kelembagaan atau evaluasi kinerja. Isu ini menghambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang cepat dan terarah.

Adapun isu-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel, antara lain :

a) Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan
b) Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personil yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya
c) Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya
d) Peningkatan sarana dan prasarana operasional
e) Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi serta memberikan teguran kepada pegawai yang bermasalah

f) Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai
g) Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

Tantangan yang dihadapi oleh Biro Umum dan Perlengkapan dalam meningkatkan pelayanan adalah sesuai dengan permasalahan di atas, sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan OPD Biro Umum dan Perlengkapan adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai banyak aset berupa tanah, gedung dan lain-lain.
- Lembaga organisasi yang mengurus perlengkapan seperti kendaraan, gedung, tanah dan aset lainnya cukup solid, aktif dan selalu berkoordinasi dengan Biro Umum dan Perlengkapan.
- Pelaksanaan informasi teknologi yang masih lemah.

Adapun solusi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Untuk permasalahan terkait kekurangan anggaran yang tersedia dapat kami mengajukan permohonan penambahan anggaran melalui APBD Perubahan.
- Untuk keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan instansi/OPD lain akan dilakukan koordinasi lebih intensif agar ditemukan akar permasalahan.
- Permasalahan diatas apabila tidak segera diatasi akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Biro Umum dan Perlengkapan sendiri bahkan juga dapat berdampak pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintaha Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 memuat program dan kegiatan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dlaksanakan pada Tahun 2025. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing OPD masih dimungkinkan untuk

mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD defintif (yang dtetapkan Gubernur).

Review rancangan awal RKPD Biro Administrasi Pembangunan terhadap analisis kebutuhan Program dan Kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel

Rancangan Rencana Perangkat Daerah Program dan Kegiatan APBD Tahun 2026

Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Biro Administrasi Pembangunan

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2026			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**4.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**Palembang**	**100%**	**1.126.127.269**	**APBD**
	4.01.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Palembang**	**100%**	**20.000.000**	**APBD**
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	1 laporan	20.000.000	APBD
	4.01.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Palembang**	**100%**	**111.160.000**	**APBD**
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	2 Dokumen	111.160.000	APBD
	4.01.01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Yang Berfungsi Baik**	**Palembang**	**100%**	**56.000.000**	**APBD**
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palembang	2 orang	36.000.000	APBD
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palembang	5 orang	20.000.000	APBD
	4.01.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Palembang**	**100%**	**233.967.269**	**APBD**
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palembang	3 Paket	33.967.269	APBD
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	1 Laporan	200.000.000	APBD
	4.01.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Yang Berfungsi dengan Baik**	**Palembang**	**100%**	**510.000.000**	**APBD**
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Palembang	1 Unit	450.000.000	APBD
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya yang Disediakan	Palembang	6 Unit	60.000.000	APBD
	4.01.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Palembang**	**100%**	**195.000.000**	**APBD**
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Laporan	195.000.000	APBD
II	**4.01.08**	**Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**Persentase OPD Yang Melaksanakan Program Sesuai Rencana dan Target**	**Palembang**	**100%**	**684.500.000**	**APBD**
	4.01.08.1.01	**Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Palembang**	**100%**	**396.500.000**	**APBD**
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Palembang	1 Laporan	205.000.000	APBD
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Palembang	1 Laporan	91.500.000	APBD
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Palembang	1 Laporan	100.000.000	APBD
	4.01.08.1.02	**Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembanguan Daerah**	**Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembanguan Daerah**	**Palembang**	**100%**	**288.000.000**	**APBD**
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Palembang	1 Dokumen	91.500.000	APBD
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Palembang	1 Laporan	105.000.000	APBD
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Palembang	1 Dokumen	91.500.000	APBD
Jumlah						**1.810.627.269**	

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 telah kami kaji secara mendalam untuk memastikan keselarasan, efektivitas, dan sinkronisasi dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Review ini menjadi langkah krusial untuk memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar mendukung visi, misi, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Secara umum, Rancangan Awal RKPD 2024 menunjukkan komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan. Namun, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius seperti Sinkronisasi Program dengan Isu Strategis Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Anggaran serta Penguatan Aspek Kelembagaan dan Tata Laksana.

Review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan pencapaian target kinerja Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat pembahasan Rancangan Awal RKPD 2025 dan Rancangan Pagu Indikatif RAPBD Tahun Anggaran 2025 pada Biro Umum dan Perlengkapan mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 277.411.371.532,- (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah untuk :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan adminitratif penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam penanganan isu-isu pemerintahan dan Otonomi Daerah.

3.1. Sasaran

Sasaran strategis dari Rencana Kerja Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat kami sampaikan dalam tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Realisasi Tahun 2025, Pagu Anggaran Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2027

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Realisasi Tahun 2024, Pagu Anggaran Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik Keuangan (%)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	1.548.386.577,-	1.539.916.568,-	99,45	2.301.708.000,-		760.084.000,-		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	161.760.000,-	155.640.000,-	96,22	135.480.000,-		192.480.000,-		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	161.760.000,-	155.640.000,-	96,22	135.480.000,-	1 Laporan	192.480.000,-	1 Laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persetase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	547.398.577,-	545.048.568,-	99,57	510.000.000,-		260.492.000,-		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.080.000,-	13.651.466,-	90,53	10.000.000,-	1 Paket	10.000.000,-	1 Paket	100%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik Keuangan (%)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	532.318.577,-	531.397.102,-	99,83	500.000.000,-	80 Laporan	250.492.000,-	80 Laporan	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	839.228.000,-	839.228.000,-	100	956.228.000,-		147.112.000,-		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	839.228.000,-	839.228.000,-	100	956.228.000,-	4 Laporan	147.112.000,-	4 Laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah								
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				700.000.000,-		160.000.000,-		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik Keuangan (%)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				700.000.000,-				
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						160.000.000,-	2 Paket	
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Yang difasilitasi dan dikoordinasikan	22.362.646.423,-	22.218.918.993,-	99,36	15.698.292.000,-		89.087.147.507,-		
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Prosentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Dilaksanakan	1.250.000.000,-	1.212.003.445,-	96,96	1.550.000.000,-		1.200.000.000,-	7 Dokumen	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik Keuangan (%)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	650.000.000,-	614.830.019,-	94,59	800.000.000	3 Dokumen	500.000.000,-	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Daerah	600.000.000,-	597.173.426,-	99,53	750.000.000,-	4 Dokumen	1.200.000.000,-	4 Dokumen	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Difasilitasi	2.751.232.000,-	2.739.257.640,-	99,56	3.348.292.000,-	265 Dokumen	1.700.000.000,-	299 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1.050.000.000,-	1.042.340.098,-	99,27	2.000.000.000,-	86 Dokumen	550.000.000,-	120 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.701.232.000,-	1.696.917.542,-	99,75	1.348.292.000,-	179 Laporan	1.150.000.000,-	179 Laporan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik Keuangan (%)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Peningkatan Mou yang difasilitasi								
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah Yang Di Fasilitasi	18.361.414.423,-	18.267.657.908,-	99,40	10.800.000.000,-	21 Dokumen	85.687.147.507,-	31 Dokumen	100%
		Jumlah Partisipasi Aktif dalam APPSI dan Jumlah Dokumen Kerjasama/MoU yang difasilitasi	827.073.423,-	816.233.230,-	98,69	800.000.000,-		687.147.507,-		
		Hibah Uang kepada Puslatpur Kodiklat-AD	6.034.341.000,-	6.014.150.500,-	99,67					
		Hibah Uang Kepada odam II Sriwijaya (Pembangunan Kolam Renang Jasdam II Sriwijaya Palembang)	9.000.000.000,-	9.000.000.000,-	100					

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik Keuangan (%)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Hibah Kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan (Pembangunan Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan)	2.500.000.000,-	2.437.274.178,-	97,49					
		Hibah Kepada Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan (Pembangunan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan)				10.000.000.000,-				
		Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan Lanjutan Kolam Renang Jasdam II/SWJ, Tribun Kolam, Kolam Renang Anak-Anak, Ruang Bilas/Lobi, Pengaspalan Komplek Jasdam II/SWJ)						11.490.604.470,-		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik Keuangan (%)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan RS. Tingkat II dr. A.K. Gani Gedung Poliklinik, Rawat Inap dan Prasarana RS. Tingkat II dr. A.K. Gani)						53.509.395.530,-		
		Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan Rumah Dinas As-Ops, As-Intel,As-Ter, Dokter,Ka. Pendam, Ka. Infolahtadam, Ka. Bintaldam dan Pengaspalan Jalan Komplek Sintraman						10.000.000.000,-		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik Keuangan (%)	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Hibah Kepada Badan Pusat Statistik Sumsel (Pembelian/Pembebasan Lahan Kantor BPS Sumsel)						4.000.000.000,-		
		Hibah Kepada Universitas Sriwijaya (Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/FISIP) Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir						6.000.000.000,-		
Jumlah….....			23.911.033.000,-	23.758.835.561,-	99,36	18.000.000.000,-		89.847.231.507,-		

3.1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang• undangan nasional serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
2. Mememperkuat pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian perkara guna memberikan perlindungan hukum kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat serta aparatur melalui penyuluhan dan edukasi hukum yang terpadu;
4. Mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia melalui program-program penyuluhan, pemantauan dan kerjasama lintas sektor;
5. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam penanganan isu-isu hukum dan HAM di Provinsi Sumatera Selatan.

3.1. Sasaran

Sasaran strategis dari Rencana Kerja Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah:

Berikut adalah sasaran utama yang mendukung tujuan di atas :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Realisasi Tahun 2024, Pagu Anggaran Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2026

NO.	Program/ Keglatan/ Sub Keglatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Keglatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Reallsasi Keuangan	Reallsasi Flslk	Pagu Anggaran Tahun2025	Target Klnerja	Praklraan Maju Tahun 2026	Target Klnerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A.	Program Penunjang Urusan PemerIntah Daerah Provins!	Persentase Pemenuhan Layanan Klnerja Perangkat Daerah	1.729.000.000	1.558.831.925	90,16%	2.061.923.000		1.809.260.000		
I	Keglatan AdmInistrasI Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan AdmInIstrasI Keuangan Perangkat Daerah	124.480.000	97.690.000	78,48%	154.080.000		90.100.000		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.480.000	97.690.000	78,48%	154.080.000	1 Dok	90.100.000	1 Dokumen	100%
II	Keglatan AdmInIstrasi Umum Perangkat Daerah	Persetase PenIngkatan AdmInistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	519.690.000	518.212.925	99,72%	285.000.000		457.860.000		
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	34.967.900	99,91%	25.000.000	1 Paket	58.000.000	1 Paket	100%
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	484.690.000	483.245.025	99,70%	260.000.000	1 Paket	399.860.000	1 Paket	100%

NO.	Program/ Keglatan/ Sub Keg latan	Indlkator Klnerja Program/ Kegiatan/Sub Keglatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Reallsasl Keuangan	Reallsasl Flsik	Pagu Anggaran Tahun	Target Klnerja	Praklraan Maju Tahun	Target Klnerja	Target Keuangan
III	Keglatan Penyedlaan Jase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jase Penunjang Urusan PemerIntah Daerah	1.051.830.000	910.109.000	86,53%	962.843.000		665.000.000		
4	SUb Kegiatan Penyediaan Jase Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jase Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.051.830.000	910.109.000	86,53%	962.843.000	1 Laporan	665.000.000	1 Laporan	100%
IV	Keglatan AdmInlstrasl Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase PenIngkatan Administrasl Kepegawalan Daerah	-	-	-	160.000.000		126.300.000		
5	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasl Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang MenglkutI Pendidikan dan PelatIhan	.	.	.	100.000.000	4orang	126.300.000		100%
6	Sub Kegiatan Pendidikan den Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas den fungsi	Jumlah Orang yang MenglkutI BImbingan TeknIs Implementasl Peraturan Perundang-Undangan	.	.	.	60.000.000	40rang	.	80rang	100%
7	SUb Kegiatan Pengadaan Pakaian Dines Lapangan	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dinas lapangan	.	.	.	.	.	.	520rang	100%

NO.	Program/ Keglatan/ Sub Keglatan	lndlkator Klnerja Program/ KeglatanlSubKeglatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Reallsasl Keuangan	Reallsasl Flslk	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Klne~a	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
V	Keglatan Pengadaan Barang MIUk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase PenIngkatan Pengadaan Barang MIUk Daerah PenunJang Urusan Pemerintah	33.000.000	32.820.000	99,45%	500.000.000		470.000.000		
8	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dines Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	300.000.000	2Unit	170.000.000	4Unit	100%
9	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarena dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33.000.000	32.820.000	99,45%	200.000.000	8Unit	300.000.000	15Unit	100%

NO.	Program/ Keglatan/ Sub Keglatan	Indikator Klnerja Program/ Keglatan/Sub	Pagu Anggaran Tahun	Reallsasl Keuangan	Reallsasl Fisik	Pagu Anggaran Tahun	Target Klnerja	Prakiraan Maju Tahun	Target Klnerja	Target Keuangan
B	Program Faslltasl dan Koordlnasl Hukum	Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesual ketentuan yang berlaku	1.591.364.000	1.569.897.772	98,65%	2.680.000.000		2.109.162,840		
VI	Kegiatan FaslUtasl Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesual ketentuan yang berlaku	641.214.805	624.456.442	97,39%	1.090.000.000		661.766.544		
11	Sub Kegiatan FasiUtasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	217.015.210	216.094.199	99,58%	450.000.000	34 Dokumen	215.000.000	20 Dokumen	100%
12	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	70.000.000	66.085.281	94,41%	100.000.000	780 Dokumen	123.826.719	700 Dokumen	100%
13	Sub Kegiatan PendokumentasianProduk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dlkelola lnformasi Hukumnya	95.000.000	92.305.719	97,16%	120.000.000	110 Dokumen	107.250.000	84Buku	100%
14	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kotayang Difasilitasi dan Dievaluasi	259.199.595	249.971.243	96,44%	420.000.000	510 Dokumen	215.689.825	450 Dokumen	100%

NO.	Program/ Keglatan/ Sub Keg latan	lndlkator KInerja Program/ Keglatan/Sub Keglatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Reallsasl Keuangan	Realisasi Flslk	Pagu Anggaran Tahun	Target KInerja	PraklIraan Maju Tahun	Target Kinerja	Target Keuangan
VII	Keglatan FaslUtasl Bantuan Hukum	Persentaae Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesual ketentuan yang berlaku	950.149,195	945,441.330	99,50%	1.590.000.000		1.447.396.296		
15	Sub Keglatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumtah Masalah Hukum yang Diselesaikan	868.149.195	863.733.665	99,49%	1.200.000.000	53Kasus	1.336.300.496	8 Perkara, 20Kasus	100%
16	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaiana Masalah Non Lltigasl dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi den HAM yang Disetesaikan	82.000.000	81.707.665	99,64%	390.000.000	3Laporan	111.095.800	3 Laporan	100%
**Jumlah ...•..... - ..... _ •.• ".....			3.320.364.000	3.128.729.697	94,23%	4.741.923,000		3.918.422.840		

Tujuan Rencana Kerja

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan panduan operasional yang jelas bagi seluruh aparatur di Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan program dan kegiatan agar sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan berjalan secara terpadu dan konsisten dengan Renstra OPD serta kebijakan pemerintah daerah.
3. Membantu dalam pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengukur kinerja.
4. Menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
5. Menyediakan tolok ukur yang jelas untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja tahunan OPD secara terukur dan terarah.

Sasaran Rencana Kerja

Sasaran Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Sumatera Selatan

No	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Target Keuangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I	4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**2.874.867.180**	**100%**	**100%**
1	4.01.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evauasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**121.000.000**		**100%**
	4.01.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.000.000	4 Laporan	
2	4.01.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**189.392.000**		**100%**
	4.01.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.392.000	6 Laporan	
3	4.01.01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**96.651.896**		**100%**

	4.01.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	96.651.896	3 Orang	
4	4.01.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**975.903.284**		**100%**
	4.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	110.000.000	10 paket	
	4.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	46.803.284	6 Paket	
	4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	819.100.000	150 Laporan	
5	4.01.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**702.500.000**		**100%**
	4.01.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	400.000.000	1 Unit	
	4.01.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	302.500.000	15 Unit	

6	4.01.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**716.820.000**		**100%**
	4.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	716.820.000	24 Laporan	
7	4.01.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.600.000**		**100%**
	4.01.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72.600.000	10 Unit	
II	4.01.04	**Program Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase fasilitasi pembinaan mental spiritual, pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti**	**37.759.632.820**	**100%**	**100%**
8	4.01.04.1.01	**Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Persentase fasilitasi pembinaan mental spiritual yang ditindaklanjuti**	**36.784.732.820**	**100%**	**100%**
	4.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	20.510.000.000	6 unit	
	4.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembangaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	16.274.732.820	7 lembaga	
9	4.01.04.1.02	**Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Persentase fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti**	**447.700.000**	**100%**	**100%**

	4.01.04.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi,Koordinasi,Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	84.700.000	1 Dokumen	
	4.01.04.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi,Koordinasi,Sinkronisasi, evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	181.500.000	1 Dokumen	
	4.01.04.1.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	181.500.000	1 Dokumen	
10	4.01.04.1.03	**Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**Persentase fasilitasi Pengembanngan Kesejahteraan Rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti**	**527.200.000**	**100%**	**100%**
	4.01.04.1.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan , Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	302.500.000	1 Dokumen	

	4.01.04.1.03.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana, administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	84.700.000	1 Dokumen	
	4.01.04.1.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian , dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian , dan Perhubungan	140.000.000	1 Dokumen	
	JUMLAH			**40.634.500.000**		

Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah untuk :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
2. Mememperkuat pelayanan administratif serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sasaran

Sasaran strategis dari Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah :

Berikut adalah sasaran utama yang mendukung tujuan di atas :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Target Keuangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A.	**4.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**1.363.906.000**		
I	**4.01.01.1.01**	**Perencanaan, Penaggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.000.000**		
	4.01.01.1.01.02	Pemyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	5.000.000	1 Dokumen	100%
II	**4.01.01.1.02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Adm. Keuangan Perangkat Daerah**	**169.886.000**		
1	4.01.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	169.886.000	1 Dokumen	100%
III	**4.01.01.1.06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persetase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**498.359.000**		
2	4.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.773.000	1 Paket	100%
3	4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	371.586.000	1 Paket	100%

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Target Keuangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
IV	**4.01.01.1.07**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**165.000.000**		
4	4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	165.000.000	1 Laporan	100%
V	**4.01.01.1.08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**375.000.000**		
5	4.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	375.661.000	1 Laporan	100%
VI	**4.01.01.1.05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah**	**150.000.000**		
6	4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan	150.000.000		100%

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Target Keuangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
B	**4.01.06**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Koordinasi Pembangunan Bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang terlaksana**	**3.836.094.000**		
VII	**4.01.06.01.01**	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang tersedia**	**1.247.299.000**		
7	4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	781.700.000	2 Dokumen	100%
8	4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	465.599.000	2 Dokumen	100%

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Target Keuangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
VIII	**4.01.06.01.02**	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	**Persentase Koordinasi sektor sumberdaya alam yang Terselenggara Dengan Baik**	**1.264.450.000**		
15	4.01.06.01.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	330.000.000	2 Dokumen	100%
16	4.01.06.01.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	468.600.000	1 Dokumen	100%
17	4.01.06.01.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi KebijakanEnergi dan Air	465.450.000	1 Dokumen	100%
IX	**4.01.06.01.03**	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	**Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD**	**1.324.345.000**		

	4.01.06.01.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	220.000.000	1 Dokumen	100%
	4.01.06.01.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik DaerahAir Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik DaerahAir Minum, Limbah dan Sanitasi	165.000.000	1 Dokumen	100%
	4.01.06.01.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BUMD	660.000.000	1 Dokumen	100%
	4.01.06.01.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	165.000.000	1 Dokumen	100%
	4.01.06.01.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BLUD	114.345.000	1 Dokumen	100%
			Jumlah…….....	**5.200.000.000**		

Kebijakan Prioritas Pembangunan dan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan

3.1.1. Kebijakan Prioritas Pembangunan

Program prioritas pembangunan pada dapat kami sajikan pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel 1. Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Keg/Sub Keg	Ket
1.	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan Meningkatnya Upaya menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Good and Clean Governance responsive dan Melayani)	1.Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Biro Administrasi Pembangunan
			2.Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	
			3.Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan

1. Uraian Tugas

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang Administrasi Pembangunan.

2. Uraian Fungsi

- pengumpulan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
- pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya.

- pengevaluasian bahan hasil pelaksanaanpembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
- pengkoordinasian bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya.
- pelaporan bahan pelaksanaanpembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya;
- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur Organisasi

   Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

   a. Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintahan Pusat, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

      1. Subbagian Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus;
      2. Subbagian Administrasi Pembangunan Tugas Pembantuan: dan
      3. Subbagian Administrasi Pembangunan Vertikal dan Nonvertikal.

   b. Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Daerah, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :

      1. Subbagian Administrasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat;
      2. Subbagian Administrasi Pembangunan Bidang Perekonomian;
      3. Subbagian Administrasi Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.

   c. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :

      1. Subbagian Program dan Kegiatan;
      2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan:
      3. Subbagian Tata Usaha.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada gambar dibawah ini :

Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Adm. Pembangunan

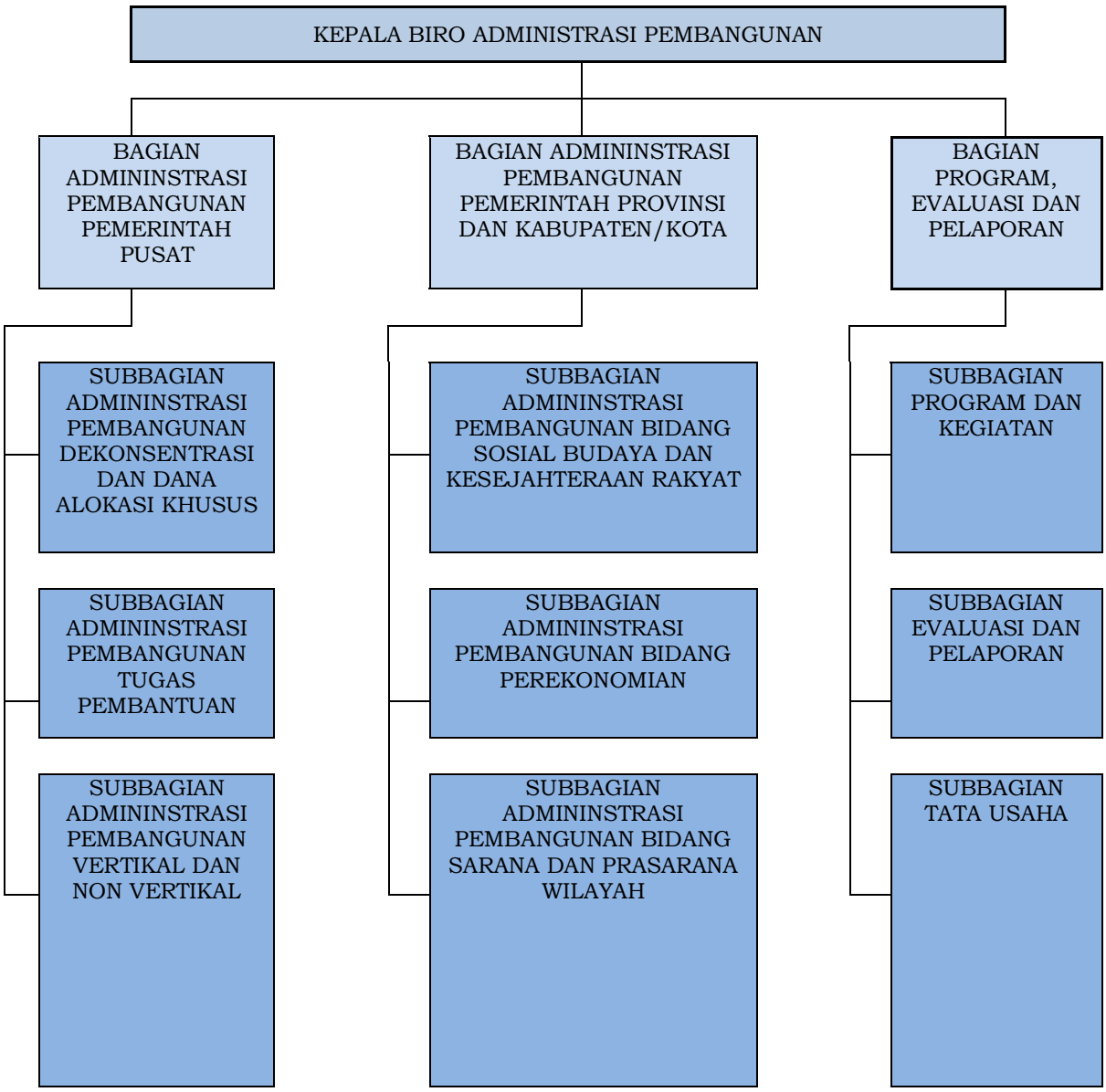

Tujuan dan Sasaran Serta Sasaran Kinerja 2025

Tujuan dan sasaran serta target kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Kinerja 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	rget 2025
erwujudanya Tata Kelola Pemerintahan	eningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	85%

Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 3. Program dan Kegiatan Biro Adm.Pembangunan Tahun 2025

IO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AGU 2025 (Rp)
	gram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.542.097.225
	giatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.500.000
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.500.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	- Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.160.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.673.225
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemDa	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional da Lapangan	420.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.264.000
	ogram Kebijakan Administrasi Pembangunan	830.000.000
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
	- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	200.000.000
	- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	120.000.000
	- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	150.000.000
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
	- Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	120.000.000
	- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	120.000.000
	- Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	120.000.000
	TOTAL	**2.372.097.225**

Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 42 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020, perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019

tentang Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai Tugas Pokok " *Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jas*a".

Untuk melaksanakan tugas – tugas dimaksud, Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa ; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkaitan dengan tugasnya.

Rincian tujuan, sasaran dan analisis capaian dapat diuraikan sebagai berikut :

1	**Tujuan**	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
2	**Sasaran**	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang di dukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan reponsif
3	**Sasaran Strategis**	:	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Indikator Kinerja dan Program Kegiatan

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Target Indikator Kinerja Tahun 2025
Biro Pengadaan Barang/Jasa

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2025
1	*2*	*3*	*4*	*7*
IKU OPD				
1	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Angka	70
PENGADAAN				
2	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0
		Persentase jumlah pengadaaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	39.00
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	77
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA				
3	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100
		Persentase Kebijakan dan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.870.000.000**
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**250.000.000**
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.000.000
	Kegiatan Admiinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**200.000.000**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**320.000.000**
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**200.000.000**
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**900.000.000**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000.000
II	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**7.830.000.000**
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	**1.200.000.000**
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	500.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	400.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	300.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**4.330.000.000**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.830.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan	250.000.000

	Barang dan Jasa	
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000
	Kegiatan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	**2.300.000.000**
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	400.000.000
	Sub Kegiatan Pendampingan,Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	600.000.000
TOTAL		**9.700.000.000**

2.1. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

2.1.2. Fungsi Pokok

Dalam melaksanakan tugas pokok Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1) penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
2) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan

secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

3) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkaitan dengan tugasnya.

2.2. Struktur Organisasi

2.2.1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :

1) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
   - Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
   - Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
   - Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

2) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
   - Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
   - Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
   - Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

3) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
   - Subbagian Tata Usaha dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
   - Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
   - Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

Tabel 3.3.
UraianTugas Kepala Bagian dan Sub Bagian pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas
1	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan

	Sumsel	evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
1.1.	Kasubbag Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	a. menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa; b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa; c. menyusun strategi pengadaan barang/ jasa; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1.2.	Kasubbag Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	a. menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; b. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; c. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/ sektoral; d. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1.3.	Kasubbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	a. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; c. memberikan masukan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumsel	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi dan/ atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa serta tata usaha.
2.1.	Kasubbagian Tata	a. melaksanakan pelayanan administrasi

	Usaha dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	kepegawaian; b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan; serta c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/ aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan; d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro; f. melaksanak.an pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LkjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro; g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasill pemeriksaan lingkup biro; h. melaksanakan perlengkapan biro; perencanaan pemeliharaan i. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; J. melaksanakan pembinaan pegawai ASN; k. membina bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ; l. mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang/ jasa; m. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2.2.	Kasubbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	a. mengelola dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ; b. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ; c. mengelola personil UKPBJ; d. mengembangkan sistem insentif personil UKPBJ; e. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;

		f. mengelola dan mengukur kinerja pengadaan barang/ jasa pemerintah; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2.3.	Kasubbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	a. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa; b. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/ atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-Monev, SIKaP; c. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; d. memberikan layanan konsultasi pengadaan barang/ jasa baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota; e. memberikan layanan advokasi pengadaan barang/jasa kepada pelaku pengadaan barang/jasa; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3	Kepala Bagian Pengelolaan Layananan Secara Elektronik Provinsi Sumsel	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.
3.1.	Kasubbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara	a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya; b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3.2.	Kasubbagian Pengembangan Sistem Informasi	a. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi; b. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ; dan c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3.3.	Kasubbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	a. menyiapkan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas; b. mengelola informasi kontrak; c. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; d. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Isu Strategis

Dalam menyusun perencanaan pembangunan perlu memperhatikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Sebagai penyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang bersifat spesifik yaitu dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, isu – isu strategis berkaitan dengan dampak yang signifikan Biro Pengadaan Barang/Jasa dimasa mendatang. Berikut Permasalahan Utama (*Strategic Issu*ed) pada lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi :

1) Penggunaan Produk dalam Negeri yang belum mencapai 100%;
2) Perlunya peningkatan belanja melalui E-Katalog Lokal;
3) Kurangnya SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; dan
4) Belum adanya Tunjangan Khusus untuk ASN UKPBJ.

Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari berbagai posisi seperti pejabat struktural, pejabat fungsional PPBJ, tim teknis, tim pengelola LPSE dan staf pendukung, yang semuanya bertanggung jawab atas kegiatan pengadaan agar berjalan sesuai ketentuan.

Berikut dijabarkan data Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan :

Tabel 3.4.
Data Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN GOLONGAN	
Unit Kerja	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatrra Selatan
Keadaan	Per 31 Desember 2024
JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN	
Laki-Laki	27 orang
Perempuan	20 orang

No.	Golongan/Ruang	Jumlah PNS Daerah Provinsi	Keterangan
1	IV/a	10	-
2	IV/b	6	-
3	IV/c	1	-
4	IV/d	-	-
5	IV/e	-	-
Jumlah		17	
6	III/a	4	-
7	III/b	5	-
8	III/c	3	-
9	III/d	18	-
Jumlah		30	
10	II/a	-	-
11	II/b	-	-

12	II/c	-	-
13	II/d	-	-
Jumlah		0	
14	I/a	-	-
15	I/b	-	-
16	I/c	-	-
17	I/d	-	-
Jumlah		0	
Jumlah Keseluruhan		47	

JUMLAH PNS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN		
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	
4	Sarjana Muda (SM)/D-3	1
5	Sarjana (S-1)	21
6	Pasca Sarjana (S-2)	25
7	Doktoral (S-3)	-
Jumlah		47

3.1. Visi dan Misi Setda Provinsi Sumatera Selatan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Visi dan Misi ini merupakan komitmen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Visi

"*Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang Berintegritas, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik*."

Visi ini mencerminkan cita-cita tertinggi Biro Organisasi untuk menjadi pilar utama dalam membangun birokrasi yang modern. Integritas menjadi landasan moral dalam setiap pengambilan keputusan. Profesionalisme memastikan setiap tugas dilaksanakan dengan kompetensi tinggi dan terukur. Sementara itu, berorientasi pelayanan publik menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh kinerja birokrasi adalah untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, Biro Organisasi merumuskan Misi yang terbagi dalam beberapa poin strategis:

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.**

   Misi ini berfokus pada penataan kelembagaan, analisis jabatan, dan evaluasi kinerja organisasi secara berkala. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur birokrasi yang ramping, responsif, dan mampu bekerja secara optimal.

2. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.**

   Melalui misi ini, Biro Organisasi berkomitmen untuk memfasilitasi dan mengawasi implementasi program-program reformasi birokrasi. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, dan peningkatan transparansi.

3. **Mengembangkan Sumber Daya Aparatur yang Kompeten dan Berbudaya Kinerja.**

   Misi ini menekankan pentingnya pengembangan kapasitas pegawai. Biro Organisasi akan menyelenggarakan program-program pelatihan yang relevan, mendorong inovasi, serta menanamkan budaya kerja yang berorientasi pada pencapaian target dan hasil.

4. **Membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang Terpadu dan Berkelanjutan.**

   Biro Organisasi akan menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap perangkat daerah menyusun perencanaan, melaksanakan, dan melaporkan kinerja dengan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan telaahan mendalam terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Telaahan ini bertujuan untuk memastikan setiap program kerja yang disusun selaras dan mendukung agenda nasional, sehingga terjadi sinergi yang optimal antara pemerintah pusat dan daerah.

a. Keselarasan dengan Kebijakan Nasional

1. Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

   Kebijakan nasional menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu prioritas utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Biro Organisasi merespons kebijakan ini dengan memprioritaskan program yang berfokus pada:

   - Penyederhanaan birokrasi

     Mengurangi alur prosedur yang berbelit-belit dan melakukan penataan kelembagaan untuk menciptakan struktur yang lebih ramping dan efisien.

   - Sistem kerja berbasis digital

     Mendorong penggunaan aplikasi dan sistem informasi terpadu untuk pelayanan internal dan eksternal.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

   Pemerintah pusat menekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN yang adaptif terhadap perubahan. Menindaklanjuti hal ini, Biro Organisasi mengintegrasikan program peningkatan kapasitas SDM dalam Renja 2025. Program ini meliputi:

   - Pelatihan dan sertifikasi untuk kompetensi teknis dan manajerial.
   - Pengembangan sistem manajemen kinerja yang objektif dan berbasis data.

3. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Kebijakan nasional mendorong implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih terukur dan berorientasi hasil. Biro Organisasi akan mengambil peran sentral dalam memastikan seluruh perangkat daerah menyusun dan melaporkan kinerja secara akuntabel, serta memfasilitasi evaluasi SAKIP secara berkala.

b. Prioritas Pembangunan Nasional yang Relevan

Biro Organisasi juga mengkaji prioritas pembangunan nasional yang memiliki relevansi langsung dengan tugas dan fungsinya. Prioritas ini menjadi acuan dalam merumuskan program kerja:

- **Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi**

  Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Biro Organisasi mendukung prioritas ini dengan memastikan tata kelola kelembagaan terkait perizinan dan investasi berjalan efisien. Proses birokrasi yang cepat akan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif.

- **Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya**

  Biro Organisasi berkontribusi melalui penataan kelembagaan yang berkaitan dengan urusan sosial dan budaya, serta memastikan SDM aparatur memiliki pemahaman yang baik tentang keberagaman dan etika pelayanan.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Renja ini memiliki **tujuan utama** untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, lincah, dan responsif terhadap tuntutan publik serta dinamika perubahan global. Melalui serangkaian program dan kegiatan, Biro Organisasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa struktur serta fungsi kelembagaan pemerintah berjalan optimal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Renja Biro Organisasi Tahun 2025 menetapkan **tiga sasaran strategis** yang saling terkait:

1. **Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Tata Laksana.**

   Sasaran ini berfokus pada penyempurnaan struktur organisasi dan proses kerja di lingkungan pemerintahan. Melalui kajian dan analisis mendalam, Biro Organisasi akan mengidentifikasi area yang membutuhkan perampingan, reorganisasi, atau penyesuaian. Tujuannya adalah untuk menghilangkan duplikasi tugas, mempercepat alur kerja, dan memastikan setiap unit kerja memiliki peran yang jelas dan relevan.

2. **Penguatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

   Sasaran ini bertujuan untuk memastikan setiap instansi pemerintah bertanggung jawab penuh atas kinerja dan pencapaiannya. Biro Organisasi akan memfasilitasi penerapan sistem akuntabilitas yang lebih ketat, transparan, dan terukur. Ini termasuk **penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**, serta mendorong penggunaan indikator kinerja utama (IKU) yang lebih spesifik dan realistis.

3. **Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.**

   Sasaran ini adalah inti dari upaya modernisasi birokrasi. Biro Organisasi akan berperan aktif dalam mendorong dan mengawasi implementasi program reformasi birokrasi di berbagai tingkatan. Fokus utamanya adalah pada **penerapan sistem manajemen berbasis elektronik (e-government)**, penyederhanaan prosedur pelayanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Sasaran ini juga mencakup upaya untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan kepuasan publik.

3.4 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun 2025 disusun untuk menerjemahkan sasaran strategis ke dalam aksi nyata melalui serangkaian program dan kegiatan yang terstruktur. Program-program ini dirancang untuk mencapai birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Program kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana kerja (Renja) Tahun 2025 Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

I. Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
6. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
7. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik

9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
10. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD

V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

11. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

VI. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.

14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

B. Program Penataan Organisasi

VIII. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

16. Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan Provinsi
17. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota
18. Sub Kegiatan Analisis Jabatan

IX. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

19. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
20. Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
21. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
22. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
23. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Pagu Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317) Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub-Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat. Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**4,200,000,000**				**4,718,000,000**		
A.	***4.01.01.***	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	***Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah***		***100%***	***2,725,000,000***	***APBD***		***100%***	***2,928,000,000***	***Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik***	**Transformasi Pelayanan Publik**
I.	4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	35,000,000	APBD		100%	90,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.01.01	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	35,000,000	APBD		1 Dok.	90,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
II.	4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	170,000,000	APBD		100%	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.02.02	2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	170,000,000	APBD		1 Dok.	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
III.	4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	300,000,000	APBD		100%	445,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.05.03	3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	150,000,000	APBD		1 Dok.	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.05.04	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	50,000,000	APBD		1 Dok.	50,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.05.05	5. Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	50,000,000	APBD		1 Dok.	50,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik

No.	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317) Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub-Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat. Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	4.01.01.1.05.09	6. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Perangkat Daerah	5 Orang	40,000,000	APBD		5 Orang	130,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.05.11	7. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Perangkat Daerah	3 Orang	10,000,000	APBD		3 Orang	15,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
IV.	4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	633,000,000	APBD		100%	900,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.06.04	8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kantor Perangkat Daerah	2 Paket	130,000,000	APBD		2 Paket	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.06.09	9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Perangkat Daerah	1 Laporan	453,000,000	APBD		1 Laporan	650,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.06.11	10. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	50,000,000	APBD		1 Dok.	50,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
V.	4.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	950,394,000	APBD		100%	390,373,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.07.02	11. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kantor Perangkat Daerah	3 Mobil (R4)	870,394,000	APBD		6 Motor (R2)	190,373,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.07.10	12. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kantor Perangkat Daerah	10 Unit	80,000,000	APBD		10 Unit	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
VI.	4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	471,606,000	APBD		100%	617,627,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.08.04	13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kantor Perangkat Daerah	1 Laporan	471,606,000	APBD		1 Laporan	617,627,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik

No.	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317) Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub-Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat. Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
VII.	4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	165,000,000	APBD		100%	285,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.09.08	14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Kantor Perangkat Daerah	5 Unit	120,000,000	APBD		5 Unit	180,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.09.09	15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kantor Perangkat Daerah	1 Unit	45,000,000	APBD		1 Unit	105,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
B.	***4.01.02***	***PROGRAM PENATAAN ORGANISASI***	***Indeks Kinerja Organisasi***		***7.19***	***1,475,000,000***	***APBD***		***100%***	***1,790,000,000***	***Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik***	Transformasi Pelayanan Publik
VIII.	4.01.02.1.01	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Peningkatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kantor Perangkat Daerah	100%	520,000,000	APBD		100%	720,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.01.01	16. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	dlm daerah, luar Daerah	1 dok	135,000,000	APBD		1 dok	250,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.01.02	17. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	dalam daerah	1 dok	135,000,000	APBD		1 dok	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.01.03	18. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Kantor Perangkat Daerah	2 dok	250,000,000	APBD		2 dok	270,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
IX.	4.01.02.1.02	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kantor Perangkat Daerah	100%	955,000,000	APBD		100%	1,070,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.02.01	19. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dalam Daerah, Luar Daerah	1 dok	225,000,000	APBD		1 dok	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.02.02	20. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dalam Daerah, Luar Daerah	2 dok	270,000,000	APBD		2 dok	300,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.02.03	21. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Budaya Kerja	Kantor Perangkat Daerah	1 Laporan	140,000,000	APBD		1 Laporan	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.02.04	22. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Dalam Daerah, Luar Daerah	1 dok	170,000,000	APBD		1 dok	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.02.05	23. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dalam Daerah, Luar Daerah	1 dok	150,000,000	APBD		1 dok	170,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
Jumlah						**4,200,000,000**				**4,718,000,000**		

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Visi dan Misi Biro Umum dan perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2019-2023, memperhatikan hasil analisis isu strategis, mengacu pada Visi dan Misi untuk masa bakti 2024-2026, maka Visi pembangunan Pemerintah Provinsi sumatera Selatan yaitu “Sumsel Unggul dan Terdepan” disusunlah beberapa kebijakan umum dan program kerja pembangunan daerah yang salah satunya adalan Program Pembangunan Pemerintah dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbasis digital untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
b. Meningkatkan mutu pelayanan satu titik (one stop services) dengan membuat mutu baku pelayanan (waktu, biaya, ketetapan) masyarakat dan meningkatkan investasi daerah.
c. Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program dan kinerja pemerintah provinsi.
d. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam melayani masyarakat dan pelaksanaan tugas pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan lanjut secara berkesinambungan.

Upaya mewujudkan visi pembangunan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mengembangkan dan memberi serta memfasilitasi pembentukan sumber daya manusia (SDM) Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan yang kreatif, sehat, produktif, inovatif dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal.
b. Meningkatkan dan memeratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat.
c. Membangun pemerintahan yang amanah berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, jujur dan bertanggungjawab dan akuntabel.

d. Membina toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragama.
e. Membangun kinerja yang amanah, bertanggungjawab, cepat, tanggap, tepat dan berjiwa melayani.

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan 2024 – 2026 dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Pengadaan barang yang dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan riil dan di prioritaskan terhadap barang yang berkaitan langsung dengan pelayanan.
2. Pemeliharaan barang dilakukan terhadap barang yang masih efisien untuk dimanfaatkan dan disesuaikan dengan prioritas menurut kebutuhan yang mendesak.
3. Pemuktahiran data barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan secara berkesinambungan.
4. Pengamanan barang di prioritaskan terhadap barang yang rawan, hilang/rusak dan diserobot.
5. Perubahan status hukum barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Umum dan Perlengkapan (OPD)

Tujuan jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang akan digunakan sebagai pedoman Penyusunan Rencana strategi Organisasi Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2024 -2026.

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Biro Umum dan Perlengkapan adalah :

- Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

2. Sasaran

Sasaran yang relevan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dan modern
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perlengkapan dan aset

3.4. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

➢ Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan nilai Pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 277.411.371.532,- (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

➢ Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas

Adapun kegiatan/sub kegiatan menjadi prioritas Biro Umum dan Perlengkapan dalam mendukung program pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 22.000.000.000,-

2) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 26.000.000.000,-

Penjabaran Program kerja di atas yang menggambarkan indikator kinerja dan kelompok sasaran, dana indikatif beserta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dijelaskan pada tabel Rencana Kerja (Renja) Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel di bawah ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	Palembang	100%				100%	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Palembang	100%	***385.800.000***			100%	***459.838.000***
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Palembang	3 Dokumen	93.800.000	PAD		3 Dokumen	120.898.000
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Palembang	2 Dokumen	38.500.000	PAD		2 Dokumen	46.585.000
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	2 Dokumen	38.500.000	PAD		2 Dokumen	46.585.000
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Palembang	2 Dokumen	38.500.000	PAD		2 Dokumen	46.585.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Palembang	2 Dokumen	38.500.000	PAD		2 Dokumen	46.585.000
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	2 Dokumen	66.000.000	PAD		2 Dokumen	72.600.000
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	3 Dokumen	72.000.000	PAD		3 Dokumen	80.000.000
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Palembang**	**100%**	***68.859.918.000***			**100%**	***71.258.003.000***
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	347 Orang/ Bulan	67.674.918.000	DAU dan PAD		347 Orang/ Bulan	70.054.503.000
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	12 Dokumen	1.100.000.000	PAD		12 Dokumen	1.100.000.000
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	5 Dokumen	25.000.000	PAD		5 Dokumen	37.500.000
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	1 Laporan	30.000.000	PAD		1 Laporan	33.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palembang	4 Laporan	30.000.000	PAD		4 Laporan	33.000.000
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Palembang**	**100%**	***2.080.000.000***	PAD		**100%**	***2.103.000.000***
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	1 Dokumen	1.650.000.000	PAD		1 Dokumen	1.850.000.000
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	4 Laporan	130.000.000	PAD		4 Laporan	143.000.000
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	1 laporan	300.000.000	PAD		1 laporan	110.000.000
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Palembang**	**100%**	***350.900.000***	PAD		**100%**	***350.900.000***
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Palembang	1 Paket	2.535.535.580	PAD		2 Paket	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palembang	5 Orang	185.900.000	PAD		4 Orang	185.900.000
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Sosialisasi	Palembang	-	-	PAD		-	-
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palembang	25 Orang	200.000.000	PAD		40 Orang	165.000.000
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Palembang**	**100%**	***36.571.000.000***			**100%**	***40.837.119.952***
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Palembang	10 Paket	800.000.000	PAD		7 Paket	1.016.119.952
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	Palembang	12 Paket	3.871.000.000	PAD		12 Paket	3.871.000.000
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Palembang	12 Paket	500.000.000	PAD		12 Paket	550.000.000
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	12 Dokumen	22.000.000.000	PAD		12 Dukumen	26.000.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	12 Laporan	9.000.000.000	PAD		12 Laporan	9.000.000.000
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	6 Dokumen	400.000.000	PAD		6 Dokumen	400.000.000
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Palembang**	**100%**	***22.328.279.700***			**100%**	***18.598.279.700***
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Palembang	R4 = 4 Unit	7.798.279.700	PAD		R4 = 4 Unit	5.798.279.700
4.01.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit yang disediakanPengadaan Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	-	-	PAD		1 Unit	270.000.000
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Palembang	4 Paket	2.530.000.000	PAD		4 Paket	2.530.000.000
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan gedung prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Palembang	50 Unit	12.000.000.000	PAD		50 Unit	10.000.000.000
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Palembang	100%	***53.928.646.000***			100%	***57.991.087.548***
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	4 Laporan	220.000.000	PAD		4 Laporan	200.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Provinsi Sumsel	50 Laporan	13.000.000.000	PAD		50 Laporan	13.000.000.000
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab/Kota Se-Sumsel	36 Laporan	26.000.000.000	PAD		36 Laporan	30.082.441.548
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Palembang	36 Laporan	14.708.646.000	PAD		36 Laporan	14.708.646.000
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Palembang	100%	***63.830.394.252***			100%	***46.963.074.300***
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Palembang	2 unit	1.000.000.000	PAD		2 unit	1.000.000.000
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Palembang	210 unit	12.983.074.300	PAD		210 unit	12.983.074.300
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Palembang	50 unit	800.000.000	PAD		50 unit	880.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Palembang	30 Unit	46.975.500.000	PAD		30 Unit	30.000.000.000
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Palembang	200 Unit	2.071.819.952	PAD		200 Unit	2.100.000.000
4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Palembang	100%	***10.755.898.000***			100%	***7.088.697.500***
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	Palembang	1 orang/ 12 Bulan	251.437.000	DAU		2 orang/ 12 Bulan	273.162.500
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH yang disediakan	Palembang	4 Paket	3.000.000.000	PAD		8 Paket	2.200.000.000
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Chek Up KDH dan WKDH	Palembang	4 Orang	15.000.000	PAD		2 Orang	11.025.000
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	Palembang	1 orang/ 12 Bulan	7.489.461.000	PAD		2 Orang/ 12 Bulan	4.604.510.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Peningkatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Palembang	100%	***15.750.000.000***			100%	***13.850.000.000***
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Palembang	30 Paket	11.000.000.000	PAD		50 Paket	10.000.000.000
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Palembang	30 Paket	3.250.000.000	PAD		30 Paket	2.250.000.000
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Palembang	15 Paket	1.500.000.000	PAD		20 Paket	1.600.000.000
		Total Keseluruhan			**277.411.371.532**				**261.000.000.000**

Dari uraian di atas, diketahui Biro Umum dan Perlengkapan Tahun Anggaran 2025 hanya memiliki 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) di dalamnya terdapat **Belanja Operasi** (meliputi : Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah) dan **Belanja Modal** (meliputi : Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Aset tetap Lainnya).

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini termasuk dalam program rutin Sekretariat Daerah, dengan kegiatannya meliputi :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	385.800.000,-
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	68.859.918.000,-
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	2.080.000.000,-
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	2.921.435.580,-
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	36.571.000.000,-
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	22.328.279.700,-
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	53.928.646.000,-
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	63.830.394.252,-
i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.	10.755.898.000,-
j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp.	15.750.000.000,-

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan:

Sasaran

Sasaran strategis dari Rencana Kerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah :

Berikut adalah sasaran utama yang mendukung tujuan di atas :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Target Keuangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A.	**4.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**49.000.500.000**		
I	**4.01.01.1.01**	**Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.000.000**		**100%**
1	4.1.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	2 Laporan	
II	**4.01.01.1.02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**229.000.000**		**100%**
2	4.01.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	229.000.000	1 Dokumen	100%

III	**4.01.01.1.05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**420.000.000**		**100%**
3	4.01.01.0.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	320.000.000	1 Paket	
4	4.01.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	2 Orang	
5	4.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	50.000.000	32 Orang	
IV	**4.01.01.1.06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persetase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.300.000.000**		**100%**
6	4.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan Yang Disediakan	2.000.000.000	1 Dokumen	
7	4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	1 Laporan	

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Target Keuangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
V	**4.1.01.01.1.07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase peningkatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**600.000.000**		**100%**
8	4.1.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	320.000.000	R4= 1 Unit	
9	4..01.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.000.000	10 Unit	
IV	**4.01.01.1.08**	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.217.597.000**		**100%**
10	4.01.01.0.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.000.000	1 Laporan	
11	4.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1.137.597.000	1 Laporan	

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Target Keuangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
VII	**4.01.01.1.09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**110.000.000**		**100%**
12	4.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50.000.000	25 Unit	
13	4.01.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50.000.000	10 Unit	
VIII	**4.01.01.1.13**	**Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase PeningkatanMateri dan Komunikasi Pimpinan**	**33.073.903.000**		**100%**
14	4.01.01.1.13	Sub Kegiatan Penyiapan Materi pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan	4.050.000.000	5 Dokumen	
15	4.01.01.1.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil FasilitasiKomunikasi Pimpinan	3.250.000.000	1 Laporan	
16	4.01.01.1.13.02	Sub Kegiatan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	25.773.903.000	1 Laporan	

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Target Keuangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
X	**4.01.01.1.14**	**Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan**	**Persentase Peningkatan Fasilitasi Keprotokolan**	**11.000.000.000**		**100%**
17	4.01.01.1.14.01	Sub Kegiatan FasiIitasi dan Koordinasi Pelaksana Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	8.850.000.000	1 Laporan	
18	4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	3.350.000.000	1 Laporan	
19	4.01.01.1.14.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	800.000.000	1 Laporan	

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, disadari dalam penyusunan RENJA Setda Provinsi Sumatera Selatan ini terdapat kekurangan karena keterbatasan baik jumlah maupun pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Palembang, 2025

SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA